

Judul : Proyek pemerintah: kementerian PUPR kejar penyelesaian pembangunan
Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

PROYEK PEMERINTAH

Kementerian PUPR Kejar Penyelesaian Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memfokuskan penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur sampai akhir tahun 2019. Namun, ada beberapa program tahun ini yang diyakini sulit tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, se usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (12/6/2019), di Jakarta, mengatakan, pembangunan 65 bendungan menjadi fokus penyelesaian hingga tahun 2023. Pemerintah akan melelang kontrak pembangunan 10 bendung-

an terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tahun ini.

Sebelumnya, berdasarkan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hanya 9 dari 21 program infrastruktur yang mesti dicapai dalam RPJMN 2015-2019 yang dipastikan tercapai. Delapan program lain dinilai perlu kerja keras untuk menyelesaikannya hingga akhir tahun, sementara empat program sisanya dipastikan sulit tercapai, antara lain, karena kendala lahan.

Empat program yang dinilai sulit dicapai adalah pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir, program terkait penyediaan air minum, program sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penyediaan hunian layak.

Alihkan anggaran

Dalam rapat, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengusulkan agar Menteri PUPR mengalihkan anggaran untuk program-program yang sudah pasti berhasil ke program yang sulit tercapai. Dengan demikian, masalah kurangnya

anggaran, yang menyebabkan program tak tercapai, dapat diatasi.

Kesenjangan infrastruktur dinilai masih terjadi di antara kota-kota besar di Indonesia. Untuk menipiskan kesenjangan, Bank Dunia memberikan pinjaman agar perencanaan pembangunan perkotaan di Indonesia berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Rabu, Bank Dunia menyatakan baru saja menyetujui pinjaman 49,6 juta dollar Amerika Serikat atau

setara Rp 706,8 miliar untuk Indonesia.

Pinjaman disalurkan melalui program National Urban Development Project (NUDP) dan ditujukan untuk membiayai proyek pemerintah dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur perkotaan.

"Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastruktur lebih efektif agar ke depan kota-kota di dunia semakin layak ditinggali dan semakin produktif," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A. Chaves.

(NAD/DIM)